

Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai

Herry Fitriansah¹

Diterima : 10 September 2012

Disetujui : 9 Oktober 2012

ABSTRACT

Fisherman community of Kwala Lama District in Serdang Bedagai Regency, North Sumatera has conducted a community based environmental management program known as the PLBM (pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat), to help restore the coastal environmental damage in the area. The study aims to identify the processes and changes that are taking place within the sustainable environmental management activity. The study employs (1) environmental, social and economic change analysis, (2) community behavior and attitude analysis, and (3) sustainable community construction process analysis. The study concludes that the community participation approach in environmental management implemented in the PLBM program has in fact encouraged many changes which lead to the community's improvement of social and economic conditions. The study found that the facilitator group selection process conducted by the administration at the preliminary stage has indeed been successfully carried out, enabling the group to carry out the program fairly and accountably, hence developing trust from the community. The program has also developed solidarity thus rendering the community ready to be fully responsible of environmental management and to continue the program.

Key words: coastal area, environmental management, community empowerment, sustainable development

ABSTRAK

Masyarakat nelayan di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara melaksanakan program pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) untuk membantu memperbaiki permasalahan kerusakan lingkungan pesisir di wilayah mereka. Studi ini hendak mengetahui proses dan perubahan-perubahan yang terjadi pada pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Studi ini melaksanakan (1) analisis perubahan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat, (2) analisis perubahan sikap dan perilaku masyarakat, dan (3) analisis proses pembentukan komunitas yang berkelanjutan. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pada program PLBPM telah mendorong banyak perubahan pada penataan lingkungan yang berdampak pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Studi ini mengindikasikan bahwa proses seleksi terhadap kelompok fasilitator yang dilaksanakan pemerintah dalam tahap awal berhasil dilakukan dengan baik karena kelompok tersebut mampu menjalankan program secara terbuka dan adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Program tersebut juga berhasil membentuk solidaritas sehingga masyarakat siap untuk bertanggungjawab secara penuh dalam pengelolaan pembangunan komunitasnya dan untuk melanjutkan program tersebut.

Kata kunci: pesisir, pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan

¹ Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai-Perbaungan, Sumatera Utara
Kontak Penulis : herryfitriansah@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil, Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang cukup tinggi, meliputi sumber daya yang dapat pulih dan sumber daya yang tidak dapat pulih. Namun wilayah pesisir dan laut Indonesia belum dikelola secara bertanggung jawab. Bahkan saat ini muncul gejala yang kurang baik, yaitu adanya cara-cara pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan yang membahayakan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Gejala tersebut antara lain: pesatnya pembangunan di wilayah pesisir yang menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem sumber daya pesisir dan laut, kurangnya kemampuan mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan banyaknya kegiatan ekstraktif yang didominasi oleh kepentingan dan pertimbangan ekonomi (Tuwo, 2011). Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan terjadinya degradasi lingkungan dan keterancaman terhadap kelestarian ekosistem pesisir. Secara garis besar gejala dan kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian sumber daya pesisir di Indonesia meliputi: pencemaran, degradasi fisik habitat, over-eksploitasi, dan abrasi pantai (Dahuri et al, 2008).

Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan pesisir dan kelautan ini paling dirasakan oleh masyarakat yang menghuni wilayah pesisir. Mayoritas masyarakat merupakan masyarakat nelayan yang menggantungkan kehidupan perekonomiannya pada sumber daya pesisir. Kerusakan pesisir menyebabkan hasil tangkapan masyarakat nelayan semakin jauh berkurang dari hari ke hari. Berkurangnya hasil tangkapan ini berimbas kepada penurunan pendapatan dan mutu kehidupan nelayan yang semakin melekatkan citra kemiskinan pada perekonomiannya mereka. Kemiskinan ini seringkali memaksa masyarakat nelayan untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan dan kelautan dengan cara-cara yang merusak kelestariannya seperti penebangan hutan bakau, penambangan batu karang, ataupun penangkapan ikan dengan alat tangkap ilegal yang merusak lingkungan.

Berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan telah dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Namun, upaya-upaya yang telah diterapkan tersebut masih belum efektif terutama dalam merubah pandangan masyarakat sebagai fokus utama pembangunan. Apalagi sebagian besar program berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan dominasi peran birokrasi dalam pembangunan. Birokrasi menjadi aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan. Pendekatan pembangunan dengan model ini mengakibatkan terjadinya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah yang diimplementasikan melalui program yang dibuat. Beberapa program pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat, pada kenyataannya cenderung mengalami kegagalan dimana masyarakat cenderung hanya diposisikan sebagai objek pembangunan (Suparjan, 2003).

Untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah terhadap potensi sumber daya alam, diupayakan sebuah strategi pembangunan lingkungan yang mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam perlindungan dan rehabilitasi lingkungan fisik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam sebagai salah satu faktor terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, menjadi semakin krusial dikarenakan masyarakat adalah pelaku utama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat

merupakan titik sentral dan salah satu syarat utama bagi keberhasilan upaya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PBLPM) adalah salah satu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian pemerintah daerah dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan yang terjadi. Program ini dapat berperan sebagai pondasi bagi pengembangan ekonomi kawasan pesisir. Melalui pelibatan pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, program ini diharapkan dapat memberikan dampak lanjutan terutama dalam pengembangan ekonomi di wilayah pesisir melalui sistem pembelajaran sederhana dalam membuat perencanaan dan menata sendiri permukiman dan lingkungannya. Proses pembelajaran ini dimulai dari proses perencanaan ruang kawasan permukiman oleh masyarakat dengan didampingi oleh pemerintah daerah dan tenaga pendamping. Masyarakat juga didorong untuk memilih dan menentukan prioritas kebutuhan yang selanjutnya direalisasikan melalui pembangunan fasilitas fisik dasar (DKP, 2006).

Desa Kwala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu desa yang melaksanakan program PLBPM pada tahun 2006. Desa ini merupakan salah satu desa yang berhasil dalam pelaksanaan program PLBPM dimana pada tahun pertama pelaksanaan program, Desa Kwala Lama terpilih sebagai desa terbaik di Indonesia dalam pelaksanaan program PLBPM. Hal ini dikarenakan kelompok masyarakat yang terlibat dalam program ini memiliki progres yang cukup baik dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang sesuai agenda-agenda yang telah direncanakan baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakatnya maupun dalam kegiatan pembangunan fisik lingkungannya (DKP, 2007). Kegiatan yang diawali dengan penataan lingkungan permukiman nelayan, penanaman kembali hutan mangrove dan pembangunan sarana penunjang permukiman, hingga saat ini masih berlanjut meski tidak ada lagi pendanaan dalam mendukung keberlanjutan kegiatan tersebut. Masyarakat Desa Kwala Lama secara kolektif menjaga dan melakukan penataan lingkungan mereka.

Terlaksananya program PLBPM ini telah mendorong perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat Desa Kwala Lama untuk semakin memiliki pengetahuan dan wawasan dalam mengelola lingkungan. Apalagi masyarakat saat ini menikmati hasil dari jerih usahanya dalam memelihara lingkungan mereka sendiri yang telah memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan kegiatan dengan rebug desa serta pelaksanaan kegiatan fisik dengan kegiatan gotong royong telah menumbuhkan kebersamaan masyarakat desa. Saat ini, perubahan perilaku masyarakat untuk sadar lingkungan secara kolektif telah memberikan kontribusi yang efektif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk itulah diperlukan suatu kajian untuk mempelajari perubahan-perubahan yang dihasilkan sebagai dampak keberhasilan program tersebut dari sudut pandang ekologi, ekonomi dan social, serta mempelajari proses terjadinya keberlanjutan pembangunan dalam pengelolaan lingkungan pesisir melalui pemberdayaan masyarakat di lokasi studi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan, kondisi pemukiman, dan kondisi sosial. Selain itu juga untuk melihat tingkat partisipasi, bentuk peran serta masyarakat dan tingkat kemanfaatan pada program PLBPM. Pendekatan ini

dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 70 responden. Untuk menganalisa hasil yang diperoleh dari kuesioner tersebut, dilakukan analisis dengan menggunakan program *sphinx*. Program ini berfokus pada analisa data yang memudahkan dilakukannya komparasi antara variabel melalui bentuk grafik. Selanjutnya, untuk memahami dan mengetahui secara lebih mendalam hasil yang diperoleh dari pendekatan kuantitatif, terutama terhadap proses perubahan dan pengembangan komunitas, dilakukan wawancara mendalam terhadap beberapa tokoh yang berpengaruh pada pelaksanaan program PLBPM. Wawancara mendalam, sebagai bentuk dari pendekatan kualitatif dilakukan terhadap 4 orang tokoh yang berkompeten dalam proses pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Untuk melakukan analisis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dilakukan reduksi data yang bertujuan untuk menyajikan data dan informasi dengan cara yang efektif dan terstruktur tergantung kebutuhan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan yakni melalui sintesis dari data hasil wawancara yang diperoleh.

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah Desa Kwala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten pemekaran baru yang berada di kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Pemekaran kabupaten ini dari kabupaten induk yakni Kabupaten Deli Serdang merupakan produk dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kabupaten ini memiliki area seluas 1.900,22 km² yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan definitif dengan Kecamatan Sei Rampah sebagai ibukota kabupaten. Adapun atas-batas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka,
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Simalungun,
- Sebelah timur dengan Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Simalungun,
- Sebelah barat dengan Kabupaten Deli Serdang.

Sebagai wilayah yang berbatasan dengan perairan Selat Malaka, Desa Kwala Lama mengalami kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang cukup parah. Kondisi yang sama juga ditemui pada desa-desa lainnya di pesisir Pantai timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Pada tahun 2006, penduduk Desa Kwala Lama mendapatkan kesempatan untuk menjalankan kegiatan pada program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PLBPM) yang merupakan program dari Departemen Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. Program ini juga digulirkan di 23 kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun yang sama. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program PLBPM di Desa Kwala Lama meliputi tiga jenis kegiatan yakni perbaikan lingkungan pesisir, perbaikan kondisi sarana dan prasarana pemukiman, serta pembangunan perumahan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Paradigma pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan solusi dari tiga paradigma pembangunan yang terkait dengan lingkungan dan sosial yaitu bahwa lingkungan untuk pembangunan ekonomi, lingkungan untuk manusia, dan lingkungan untuk lingkungan. Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk kesejahteraan manusia (termasuk didalamnya pembangunan bidang ekonomi) dan kelestarian lingkungan hidup.

Prinsip-prinsip dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menurut Mitchell (2006) meliputi:

- Terpenuhiya kebutuhan dasar (pokok) manusia;
- Tercapainya keseimbangan dan keadilan sosial;
- Memberikan kebebasan untuk menetapkan nasibnya sendiri secara demokratis;
- Menjaga kelestarian ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati;
- Mempertimbangkan aspek-aspek kesatuan antara aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi.

Pengelolaan Berkelanjutan Lingkungan Pesisir

Prinsip dasar dari pengelolaan lingkungan pesisir secara berkelanjutan adalah mewariskan generasi masa depan dengan kesejahteraan, meliputi pengertian dan pemahaman ilmu pengetahuan, pengertian dan pemahaman teknologi, pengertian dan pemahaman mengenai aset lingkungan berupa sumber daya alam. Prinsip ini diperkenalkan melalui konsep keberlanjutan berupa: 1) integritas lingkungan, 2) efisiensi ekonomi, dan 3) kesamarataan. Kesamarataan ini didefinisikan sebagai kesamarataan hak atas aset sumber daya alam tidak hanya untuk generasi saat ini tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Pengelolaan wilayah pesisir menghendaki adanya pengendalian diri warga masyarakat untuk tidak merusak lingkungan. Artinya bahwa kelompok masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi hendaknya dapat berbagi kemampuan dan rasa dengan saudaranya yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mengurangi konsumsi yang berlebihan (Tuwo, 2011)

Partisipasi Masyarakat dalam Lingkup Pembangunan Berkelanjutan

Partisipasi masyarakat menurut Mussadun (2006) adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan dengan mengakomodasi aspirasi, nilai budaya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi tersebut dapat dimanfaatkan pula sebagai sarana mengkomunikasikan keinginan masyarakat untuk ikut melakukan kontrol terhadap kegiatan pembangunan. Ada tiga alasan penting perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat; (2) masyarakat akan lebih mempercayai suatu program pembangunan, jika merasa dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut, sehingga akan mempunyai rasa memiliki; (3) masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Partisipasi dan Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir

Dalam konteks pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu di Indonesia, perlu dikembangkan strategi pembangunan komunitas. Strategi ini, seperti yang dikemukakan Hudiansyah (2003), dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni melalui pendekatan yang bersifat struktural dan non struktural. Pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi, dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan sistem hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah utama di bidang sosial dan ekonomi yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat lokal pada posisi yang sulit.

Pendekatan struktural membutuhkan langkah-langkah strategi antara lain:

1. Pengembangan aksesibilitas masyarakat pada sumber daya alam;
2. Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan;
3. Pengembangan kapasitas kelembagaan ;
4. Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat.

Pendekatan non struktural sebagai pendekatan yang subjektif menempatkan manusia sebagai subjek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam disekitarnya.

ANALISIS

Analisis Perubahan Kondisi Lingkungan

Pelaksanaan program PLBPM yang mencakup kegiatan perbaikan lingkungan pesisir, perbaikan kondisi sarana dan prasarana pemukiman, dan pembangunan perumahan membawa banyak perubahan pada perbaikan lingkungan pemukiman pesisir Desa Kwala Lama. Saat ini, berkat keberhasilan program tersebut, gambaran pemukiman nelayan yang selalu diidentikkan dengan citra kumuh telah mulai berubah. Terdapat 15 rumah yang dibangun pada tahun 2006. Berdasarkan pendanaan yang diberikan pemerintah, sebenarnya hanya 14 unit yang dianggarkan, tetapi masyarakat mampu menambah 1 unit dari swadaya mereka sendiri. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga membangun 1 unit rumah ibadah dari pendanaan masyarakat.

Untuk pembangunan sarana infrastruktur lingkungan, berdasarkan rebug yang dilakukan bersama dengan masyarakat, dilakukan pembangunan sarana kebersihan pemukiman dan pembangunan sarana penunjang aktivitas usaha perikanan, meliputi pembangunan dermaga kecil dan pembangunan lening, serta pembangunan aksesibilitas pemukiman berupa jalan dan jembatan. Untuk kegiatan-kegiatan dalam lingkup perbaikan lingkungan dilakukan penanaman mangrove sebanyak 27.500 bibit mangrove jenis *Rhizophora sp* dan jenis *Avicennia sp* yang diikuti dengan penanaman sebanyak 9000 bibit mangrove pada tahun berikutnya.

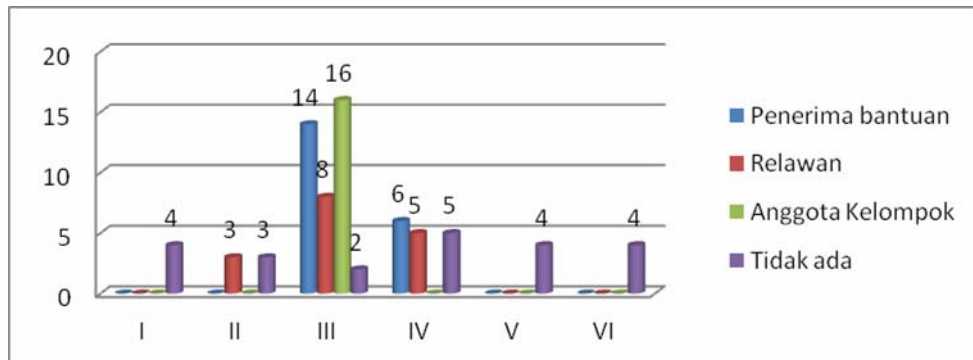
Proses perencanaan dan penentuan program pada kegiatan PLBPM ini dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Pembangunan yang pertama kali dilakukan adalah bantuan perumahan sebanyak 14 unit kepada masyarakat prioritas. Proses penentuan keluarga yang layak mendapat bantuan perumahan ini dilakukan pada rebug masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial yang bisa berakibat pada konflik, juga agar bantuan perumahan bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Apalagi mengingat hampir sebagian besar perumahan masyarakat nelayan di Desa Kwala Lama adalah perumahan kumuh. Namun tingginya rasa persaudaraan membuat masyarakat benar-benar memilih saudaranya yang lebih membutuhkan bantuan renovasi rumah. Kebersamaan yang terjalin pada rebug desa dan pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilakukan secara gotong royong tetap terjalin pada pembangunan sarana pemukiman dan pemeliharaan lingkungan hingga saat ini.

Analisis Perubahan Sikap dan Perilaku Masyarakat

a. Perubahan pada Aspek Sosial

Sistem kekeluargaan yang diterapkan dalam program mengakibatkan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Meski hanya 14 keluarga yang mendapat bantuan perumahan, tetapi masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam pembangunan rumah. Mekanisme

kerja gotong royong yang diterapkan mengakibatkan masyarakat secara bergantian membantu pembangunan rumah masyarakat lainnya. Bantuan yang diberikan berupa sumbangan tenaga dan makanan.



GAMBAR 1
PERAN SERTA MASYARAKAT PADA PROGRAM

Adanya program PLBPM memberikan kontribusi terhadap pola pikir masyarakat nelayan. Apalagi mengingat kinerja kelompok yang dilakukan Kelompok Bina Nelayan sebagai leading sektor pelaksana program PLBPM yang menuai prestasi, memberikan dorongan bagi masyarakat tentang pentingnya berkelompok. Sebelum adanya program PLBPM, masyarakat nelayan Desa Kwala Lama kurang memahami kelembagaan kelompok nelayan. Masyarakat nelayan di Desa Kwala Lama dahulunya bekerja dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan hubungan kekeluargaan maupun hubungan antara pekerja dengan majikan. Berdasarkan kurun waktu 2004-2006, hanya ada 2 kelompok nelayan di desa ini yang terdaftar di desa. Saat ini mulai bermunculan kelompok-kelompok nelayan karena para nelayan mulai memahami peran penting kelembagaan masyarakat nelayan, terutama dalam meningkatkan kemampuan berusaha dan bekerja sama guna mencari solusi dalam permasalahan mereka dan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka. Masyarakat mulai menyadari bahwa mekanisme kerja secara berkelompok dapat memberikan kemudahan dan kemanfaatan dalam pekerjaan. Selain itu mekanisme bekerja dalam kelompok memberi kemudahan kepada pemerintah untuk memudahkan pendataan dan dalam memperlancar proses komunikasi dan pembinaan terhadap masyarakat nelayan.

b. Perubahan pada Aspek Ekonomi

Meski mayoritas pembangunan pada program PLBPM difokuskan kepada pembangunan fisik sarana pemukiman dan tidak memberikan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat, namun program tersebut membawa dampak positif terhadap perubahan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

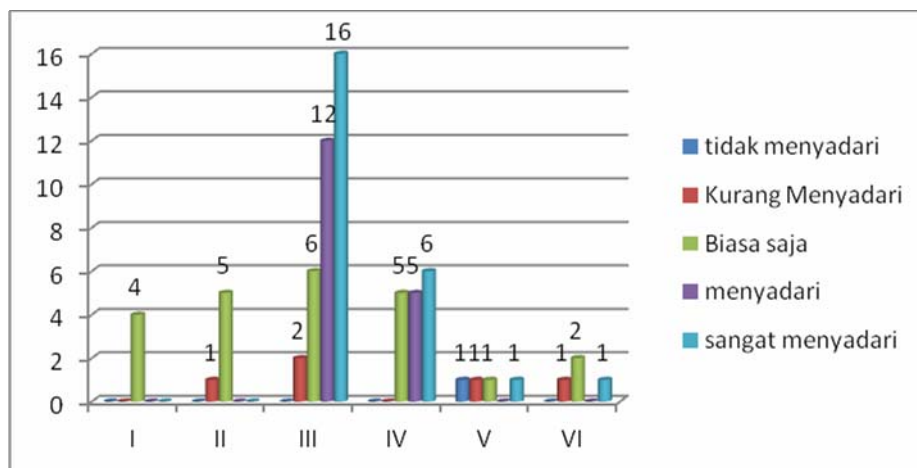
- Bantuan rumah baru yang permanen menyebabkan masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan rumah tersebut tidak perlu lagi menyisihkan uangnya untuk keperluan perawatan rumah atau ongkos sewa rumah. Mereka bisa menggunakan uang perawatan tersebut untuk hal lain yang lebih bermanfaat seperti pendidikan maupun kesehatan keluarga.
- Proses pembangunan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat menjadikan mereka memiliki otoritas dalam menentukan pekerja. Umumnya bila ada program pembangunan yang dilakukan pemerintah, para pekerja didatangkan dari luar desa,

maka kali ini masyarakat terutama tukang bangunan, memiliki kesempatan untuk bekerja membangun daerahnya sendiri sebagai buruh bangunan.

- Tergeraknya masyarakat untuk bekerja secara kelompok, memberikan perubahan ekonomi kepada mereka. Masyarakat yang dulunya menggantungkan modal kepada tengkulak, kini sudah mulai melepaskan diri dari jeratan tersebut dengan bekerja secara kelompok. Masyarakat lebih memilih untuk menggantungkan keuangannya melalui sistem finansial lewat kelompok mereka.

c. Perubahan pada Aspek Ekologi

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan pesisir dimulai semenjak kegiatan penanaman bibit mangrove di Dusun III pada tahun 2006. Hampir seluruh masyarakat berpartisipasi pada penanaman mangrove tersebut. Yang menarik dari kegiatan tersebut bahwa masyarakat tidak hanya melakukan penanaman secara bersama tetapi juga turut berpartisipasi pada usaha perawatan dan pemeliharaan ekosistem mangrove yang telah ditanam tersebut. Hal inilah yang menjadi penyebab kenapa 6 hektar lahan yang ditanami 27.500 bibit mangrove pada tahun 2006 dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan saat ini usaha pemeliharaan mangrove tersebut tetap dipertahankan.



GAMBAR 2
TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam usaha menjaga dan memelihara lingkungan merupakan kemajuan yang sangat berarti yang dihasilkan dari program PLBPM. Pengetahuan dan kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan telah terbentuk pada diri masyarakat. Indikasi dari perubahan pada diri masyarakat tersebut terlihat jelas pada mekanisme pemeliharaan mangrove yang diterapkan. Mangrove yang telah ditanam dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Saat ini keberadaan ekosistem mangrove tersebut juga telah menjadi ekosistem bagi berbagai burung dan biota laut seperti kepiting dan udang.

Analisis Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses pengembangan kapasitas komunitas masyarakat nelayan Desa Kwala Lama dalam pemberdayaan masyarakat pada program PLBPM melibatkan 3 aktor yakni: Kelompok Bina Nelayan, Dinas Perikanan dan Kelautan Serdang Bedagai, dan komunitas masyarakat nelayan Desa Kwala Lama. Ketiga aktor utama pada pelaksanaan program PLBPM memiliki motivasi

yang sama dalam memperbaiki kondisi lingkungan. Pada satu sisi, sebagai kabupaten baru, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ingin mewujudkan pembangunan yang lebih baik sesuai dengan visi dan semangat pemekaran kabupaten. Hal inilah yang mendorong pemerintah kabupaten, dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan, untuk melakukan survei dan penilaian serta meminta rekomendasi dari organisasi yang memiliki kompeten dalam kehidupan nelayan di Serdang Bedagai sebelum menentukan desa sasaran dan kelompok sasaran untuk menjalani program. Di sisi lainnya, anggota Kelompok Bina Nelayan memiliki keinginan dan motivasi untuk merubah kondisi kehidupan di lingkungan yang mereka huni selama bertahun-tahun. Kesamaan budaya dan ikatan emosional antara para anggota kelompok dengan masyarakat tidak menjadikan sebuah kesulitan bagi mereka untuk berbaur dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program. Berdasarkan proses tersebut, beberapa faktor pembentuk pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Kepemimpinan

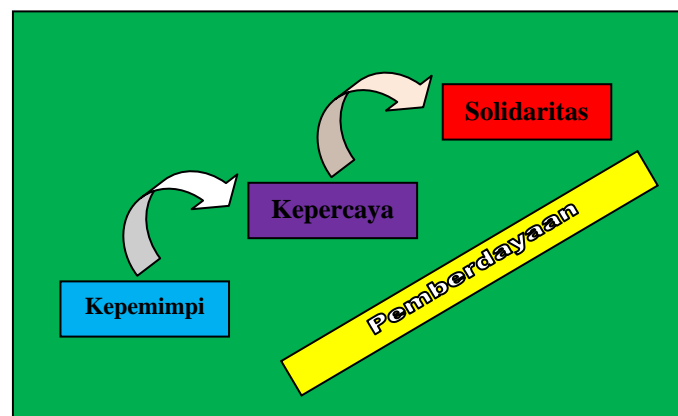
Kelompok Bina Nelayan yang dibentuk atas ide dan keinginan dari seseorang yang sekarang ini menjadi ketua dari kelompok tersebut, memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan setelah bencana tsunami yang ikut menimpa kawasan desa tersebut pada tahun 2004. Hingga saat ini, tujuan dari kelompok tersebut tidak berubah dan diaplikasikan pada pelaksanaan program. Ketua Kelompok Bina Nelayan berhasil dalam menumbuhkan keyakinan para anggotanya dan juga para penduduk di Desa Kwala Lama.

b. Kepercayaan

Aspek kepercayaan ini merupakan indikasi terhadap kejujuran, transparansi, dan integritas dari ketua kelompok sehingga masyarakat dapat menerima dengan mudah segala instruksi, arahan dan himbauan yang disampaikan. Kepercayaan masyarakat pada program tersebut diimplikasikan pada dua bentuk. Yang pertama, aksesibilitas masyarakat terhadap informasi yang diberikan cukup tinggi yang membuat masyarakat memahami program PLBPM. Yang kedua, bahwa penyampaian informasi tersebut memungkinkan adanya interaksi yang transparan dan terbuka dalam bentuk komunikasi yang efektif yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keinginan, dan pemikirannya dalam program.

c. Solidaritas

Solidaritas yang terbentuk tersebut menimbulkan perasaan berbagi satu dengan yang lain apalagi masyarakat tersebut merupakan komunitas yang telah lama menghuni kawasan Desa Kwala lama.



GAMBAR3
FAKTOR PEMBENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Analisis Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat

Melihat pelaksanaan siklus pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas masyarakat yang ada di Desa Kwala Lama saat ini, maka sebenarnya masyarakat telah siap untuk melanjutkan program pemberdayaan di desanya. Kesimpulan ini didukung dengan telah terbentuknya kesadaran masyarakat untuk bekerja secara berkelompok. Keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di desa juga terkait adanya keinginan masyarakat untuk membentuk koperasi. Inisiatif pembentukan koperasi ini didasari dari keinginan masyarakat untuk terlepas dari bantuan pinjaman berupa hutang yang menjerat dari para nelayan majikan. Dengan koperasi juga memungkinkan untuk terbentuknya dukungan dan kerjasama yang melibatkan lembaga pendanaan pemerintah maupun non pemerintah. Saat ini koperasi dengan sistem syariah berupa BMT (*baitul maal wa tamwil*) dengan nama yang sama dengan nama Kelompok Bina Nelayan, telah melayani pemodal dan usaha simpan pinjam bagi nelayan. Koperasi ini juga menyediakan penjualan beberapa barang kebutuhan untuk kegiatan perikanan seperti jaring, tali, pemberat dan lain sebagainya.

Indikator selanjutnya yang menunjukkan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kwala Lama adalah kepercayaan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Desa Kwala Lama sehingga berimbas kepada masyarakat di dusun lainnya. Kegiatan dari pemerintah yang diluncurkan seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan pemberian bantuan alat tangkap ikan dan bantuan perahu nelayan, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi wanita nelayan, kegiatan usaha pengolahan perikanan dan lainnya.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat yang muncul di tengah-tengah masyarakat Desa Kwala Lama menunjukkan bahwa masyarakat juga memiliki kompetensi dan kemampuan dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan pengelolaan lingkungan di kawasan mereka. Pemberdayaan yang muncul menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa program yang mereka jalankan bukan semata-mata program dari pemerintah, tetapi juga menjadi program mereka sendiri. Dengan kesadaran yang melekat pada diri masyarakat mengindikasikan bahwa pengelolaan lingkungan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat penghuni suatu kawasan dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Ditinjau dari proses pembentukan pemberdayaan masyarakat pada program PLBPM, terdapat tiga aktor yang memainkan perannya dengan sempurna yakni: pemerintah daerah sebagai pembina dan pengarah program, masyarakat lokal sebagai pelaksana utama seluruh kegiatan dan Kelompok Bina Nelayan yang memfasilitasi hubungan kedua aktor secara transparansi dan terbuka. Persepsi yang sama dari ketiga aktor tersebut terhadap keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan lingkungan memberikan motivasi untuk menjalankan program dengan baik. Keputusan pemerintah dalam memilih Kelompok Bina Nelayan sebagai fasilitator program merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan yang ditunjukkan ketua Kelompok Bina Nelayan dalam mengarahkan dan membina anggota kelompok secara khusus dan masyarakat secara umum, menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi secara total dalam memperbaiki lingkungan mereka. Kepercayaan tersebut menumbuhkan solidaritas sosial antara masyarakat yang berdampak kepada keberlanjutan usaha masyarakat dalam mengelola dan memelihara lingkungan mereka.

Secara keseluruhan, dari rangkaian pembentukan pemberdayaan masyarakat pada program PLBPM hingga terjadinya keberlanjutan dari pemberdayaan tersebut telah berhasil meningkatkan kapasitas sosial bagi masyarakat di Desa Kwala Lama. Bahkan pemberdayaan masyarakat yang telah muncul tersebut telah memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pengelolaan lingkungan alam di Desa Kwala Lama. Pemberdayaan masyarakat yang telah dibangun melalui pendekatan partisipasi dengan program PLBPM menjadi suatu proses pembelajaran bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, FT Undip. 2012. "Penilaian Risiko dan Perencanaan". Sistem Peringatan dan Peramalan Banjir sebagai Bentuk Adaptasi Perubahan Iklim melalui Kesiapsiagaan Risiko Banjir Kota Semarang, sebagai rangkaian proyek dalam Program ACCRN, didukung oleh The Rockefeller Foundation, Mercy Corps dan Pemerintah Kota Semarang.
- Kongprasertamorn, Kamonthip. 2007. "Local wisdom, Environmental Protection and Community Development: the Clam farmers in Tambon bangkhunsai, Phetchaburi province, Thailand", dalam MANUSYA: Journal of Humanities 10.1.
- TDMRC Syiah Kuala University Banda Aceh Indonesia. TDMRC Unsyiah Gali Kearifan Lokal Pengurangan Risiko Bencana. Diakses tanggal 20 Desember 2012 melalui <http://www.tdmrc.org/id/597.jsp>.
- United Nations, 2000. Disaster through Different Lens. A guide for Journalists Covering Disaster Risk Reduction.